

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Hongaria menjadi sebuah negara demokratis setelah diadakannya Round Table Talks pada tahun 1989. Round Table Talks ini dimaksudkan sebagai pelepasan diri dari rezim lama dan juga penciptaan tatanan kelembagaan baru untuk pemerintahan yang demokratis. Namun transisi tersebut tidak menjadikan Hongaria negara demokrasi sepenuhnya. Demokrasi tidak sepenuhnya langsung diterapkan di Hongaria. Hongaria tidak cukup kuat dalam proses negosiasi untuk berkompromi dengan kelompok komunis di Hongaria (Bozóki, 2000). Semenjak menjadi sebuah negara demokrasi, Hongaria mulai menjalin hubungan internasional dengan negara-negara dalam sistem internasional. Hongaria juga mulai melakukan sistem pemilihan multi partai untuk parlemennya pada tahun 1990. Semenjak tahun 1990, Hongaria terus menggunakan sistem pemilihan untuk menentukan partai yang akan memimpin Hongaria. Tahun 1998 menjadi tahun pertama untuk Partai Fidesz, untuk memimpin Hongaria setelah diberlakukannya sistem pemilihan. Pada kemenangan Partai Fidesz tersebut, partai mengusung Viktor Orban untuk menjadi Perdana Menteri Hongaria.

Tahun 1998-2002 menjadi periode pertama kepemimpinan Orban di Hongaria. Semenjak tahun 2002, Hongaria beberapa kali mengalami perubahan pemenang dalam setiap pemilihan, hingga pada tahun 2010, Partai Fidesz kembali terpilih. Terpilihnya Partai Fidesz ini menjadikan Viktor Orban kembali memimpin Hongaria, sebagai perdana menterinya. Tepat sebelum kepemimpinan periode kedua Orban, Hongaria dipimpin oleh Gordon Bajnai. Gordon Bajnai yang memiliki latar belakang ekonomi, selama kepemimpinannya, Bajnai menerapkan kebijakan-kebijakan yang berfokus pada mendorong Hongaria untuk melewati krisis ekonomi (Martin 2009 dalam The European Institute, 2009). Selama masa pemerintahan Gordon Bajnai, Hongaria mengalami banyak perubahan di sektor

ekonominya. Kemajuan ekonomi Hongaria semakin pesat karena pada pemerintahan Bajnai, Hongaria memfokuskan pada kemajuan ekonomi dengan penerapan ekonomi pasar (Kornai, 2015). Perekonomian Hongaria diperbaiki dengan memfokuskan pada penerapan hukum dan pemberian kesempatan bagi pihak-pihak swasta.

Bajnai adalah seorang perdana menteri yang pro terhadap adanya demokrasi dan sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Selain itu, Gordon Bajnai juga terkenal sebagai sosok yang sangat aktif dalam menyuarakan anti rasisme dan sangat aktif dalam mengikuti aktivitas internasional dan menjalin hubungan antara Hongaria dengan aktor-aktor lain. Gordon Bajnai memiliki pandangan akan perlunya Hongaria untuk aktif dalam berbagai kegiatan dengan pasar ekonomi dan menjalin hubungan dengan aktor-aktor selain negara untuk menjaga kestabilan kehidupan Hongaria. Setelah Gordon Bajnai memimpin Hongaria, di pemilihan selanjutnya pada tahun 2010, partai yang menjadi pemenang adalah Partai Fidesz, yang berkoalisi dengan KDNP (Christian Democratic People's Party). Kemenangan Partai Fidesz ini membawa Viktor Orban kembali memimpin Hongaria dan menjadi periode kedua kepemimpinan Orban. Namun pada periode kedua kepemimpinan Orban ini, terjadi beberapa perubahan kebijakan di Hongaria. Kemenangan Partai Fidesz menjadi salah satu faktor penyebab dari transisi ideologi Hongaria. Terdapat beberapa hal yang berbeda dari pemimpin Partai Fidesz, Viktor Orban, ini ketika memimpin Hongaria untuk yang kedua kalinya.

Tabel 1.1. Perbedaan Sistem Pemerintahan Viktor Orban pada Periode I dan Periode II

No.	Pembeda	Periode I	Periode II
1	Pandangan terhadap demokrasi	Pro	Kontra
2	Kerja sama internasional	Pro	Membatasi

Sumber: Bajomi-Lázár dan Horváth, 2013

3	Kerja sama ekonomi	Aktif dalam pasar bebas	Membatasi kerja sama ekonomi dengan negara dan aktor lain
----------	---------------------------	-------------------------	---

Perbedaan lain yang menjadi sorotan pada pemerintahan Orban di periode keduanya ini adalah adanya paradigma baru dalam sejarah komunikasi politik di Hongaria. Bentuk baru dari komunikasi politik tersebut disebut dengan kebangkitan *old school propaganda* (Bajomi-Lázár dan Horváth, 2013). *Old school propaganda* ini banyak dilakukan pada masa perubahan demokrasi di Hongaria tahun 1989-1990. Pada masa pemerintahan Orban kedua, propaganda- propaganda seperti yang terjadi pada era Perang Dingin di Hongaria terjadi kembali. Kelompok demonstran yang menyuarakan pendapatnya pada awal-awal masa kampanye hingga terpilihnya Orban, menamai diri mereka *Peace March*. Kata “*peace*” di sini identik dengan “*peace*” yang disuarakan ketika Perang Dingin, di mana kelompok tersebut mendeklarasikan diri sebagai “kamp damai” dengan pandangan politik luar negeri dalam komunikasi resmi dalam istilah “perjuangan akan perdamaian” (Bajomi-Lázár dan Horváth, 2013).

Naiknya Orban menjadi Perdana Menteri Hongaria dan adanya *Peace March* ini menjadi penanda perubahan paradigma dalam komunikasi politik. Konsep propaganda komunikasi politik yang digunakan sejak abad ke-20 ini telah banyak menjadi kajian oleh beberapa pakar. Secara samar, konsep ini dapat dideskripsikan sebagai “percobaan untuk mengubah pikiran” tanpa menggunakan paksaan secara fisik (Brown, 1971). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan biasanya meliputi iklan, *brainwashing*, pemberian informasi yang salah, pemasaran politik, manipulasi, persuasi, kampanye dan bentuk komunikasi massal lainnya. Pada kemenangannya yang kedua ini, Orban secara langsung memang sudah mengutarakan keinginannya untuk memperbarui Hongaria secara radikal (Becker, 2010). Kurangnya perhatian dan ketertarikan publik terhadap Partai MSZP juga menjadi salah satu faktor yang mendukung alasan Orban untuk mengubah Hongaria (Becker, 2010). Salah satu konsekuensi dari perubahan kebijakan yang diberlakukan oleh Viktor Orban adalah

Pemerintah Hongaria mulai merancang serangkaian tindakan yang dapat membatasi gerakan-gerakan organisasi- organisasi non-pemerintah di Hongaria.

Tindakan-tindakan tersebut telah dimulai sejak Viktor Orban mulai masuk kembali dalam pemerintahan di Hongaria. Fokus dari serangkaian tindakan tersebut adalah organisasi-organisasi non-pemerintah yang didanai oleh yayasan milik George Soros. Pemerintah Hongaria mengambil tindakan publik pertamanya pada tahun 2014. Pada tahun tersebut Pemerintah Hongaria menerbitkan daftar organisasi-organisasi yang dinilai “problematis” (Hungarian Helsinki Committee, 2014). Terlepas dari fungsinya, yaitu untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh negara, organisasi-organisasi tersebut dinilai problematis karena menerima bantuan dana asing. Dari beberapa nama organisasi yang tercantum dalam daftar tersebut, beberapa di antaranya merupakan organisasi yang didanai oleh yayasan milik George Soros, seperti Transparency International, the Hungarian Helsinki Committee dan the Civil Liberties Union. George Soros yang merupakan seorang keturunan Amerika-Hongaria ini mendirikan yayasannya yang diberi nama Open Society Foundation di Hongaria, yang bergerak untuk memberikan bantuan dana kepada organisasi-organisasi yang bergerak di bidang hak asasi, kemanusiaan, pendidikan hingga sosial politik.

Open Society Foundation telah banyak berkontribusi dalam pendanaan beberapa organisasi non-pemerintah di beberapa negara di Eropa, termasuk di Hongaria. Beberapa organisasi non-pemerintah Hongaria yang menerima dana dari Open Society Foundation, seperti Hungarian Helsinki Committee, Partners Hungary Foundation, HFH International Hungary Szolgaltato Nonprofit Kft., Rodav Amaro Drom Association, dan Center for the Research of Ethnicity and Culture (CVEK) (Open Society Foundation, t.t.).

Tabel 1.2. Contoh Organisasi-organisasi, Tujuan, dan Ancaman yang Dikhawatirkan oleh Pemerintah Hongaria

No.	Nama Organisasi	Tujuan Didirikan	Ancaman Menurut Pemerintah Hongaria
1	Hungarian Helsinki Committee	Organisasi hak asasi manusia untuk kepentingan umum yang melindungi martabat manusia melalui kegiatan hukum dan publik	Organisasi seperti ini dianggap terlalu menyuarakan nilai- nilai demokrasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Hongaria
2	Partners Hungary Foundation	Mengajarkan dan membantu imigran dari luar Hongaria untuk beradaptasi di Hongaria, juga untuk memberikan edukasi pada warga Hongaria mengenai masyarakat terbuka, serta memberikan pendidikan kepada masyarakat minoritas Roma di Hongaria	Organisasi seperti ini dianggap memberikan akses pada imigran asing untuk tinggal di Hongaria secara ilegal
3	Rodav Amaro Drom Association	Mengadakan kampanye untuk memperjuangkan hak, terkait dengan skema ketenagakerjaan “ <i>public works</i> ” di Hongaria dan mendorong kemajuan hidup kelompok minoritas Roma	Organisasi seperti ini dianggap melakukan pemberontakan dan mendukung imigran
4	Center for the Research of Ethnicity and Culture (CVEK)	Melakukan penelitian terhadap suatu sekolah dasar di Hejókerezstúr, Hongaria dengan tujuan akhir mengadakan seminar yang berfokus pada transferabilitas nilai-nilai yang baik untuk sekolah di Slovakia	Organisasi seperti ini dianggap dapat mengajarkan nilai- nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai di Hongaria secara tidak langsung
5	HFH International Hungary Szolgaltato Nonprofit Kft.	Mengadakan kampanye sosial untuk beberapa topik permasalahan sosial yang sedang terjadi di Hongaria	Organisasi seperti ini dianggap terlalu menyuarakan nilai- nilai demokrasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Hongaria

Sumber: diolah oleh penulis (Open Society Foundation, t.t.).

Apabila ditelaah lebih lanjut, perubahan kebijakan di Hongaria juga tidak sesuai dengan perundang-undangan yang sebelumnya sudah diberlakukan. Dalam perundang-undangan Hongaria, masyarakat didefinisikan sebagai entitas yang berasal dari kalangan non-pemerintah, non-profit, serta non-militer. Selain perundang-undangan tersebut, hukum dasar Hongaria juga menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendirikan dan bergabung dalam sebuah organisasi (Council of Europe, 2016). Bentuk-bentuk umum organisasi non-pemerintah yang ada di Hongaria, seperti asosiasi, yayasan, perusahaan non-profit, dan kelompok masyarakat sipil. Asosiasi, yayasan dan perusahaan non-profit digolongkan sebagai “*Public Benefit Organizations*,” (PBOs) (Council of Europe, 2016). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PBOs selalu ditujukan sebagai bentuk pelayanan publik. PBOs beroperasi sebagai lembaga *check and balance* dan penyampai kritik terhadap kekuasaan negara, dengan memperkuat supremasi hukum dan menjamin perlindungan hak asasi manusia (Hungarian Helsinki Committee, 2014).

Pemerintahan di Hongaria, semenjak naiknya Viktor Orban sebagai perdana menteri, telah banyak melakukan perubahan terhadap kebijakannya mengenai lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi non-pemerintah, terutama yang menerima dana dari yayasan milik George Soros. Namun menurut Pemerintah Hongaria dalam Sidang Dewan Eropa (Venice Commission, 2017), target dari kebijakan ini tidak hanya untuk organisasi non-pemerintah, organisasi pemerintah yang menerima pendanaan asing juga perlu memenuhi kewajiban yang telah ditentukan. Kebijakan pembatasan untuk organisasi-organisasi penerima dana Soros ini kemudian dikenal dengan “*The Anti-Soros Policy*”. Kebijakan tersebut juga memberikan dampak yang mana membuat masyarakat Hongaria merasa hak-haknya untuk berbicara menjadi hilang. Organisasi non-pemerintah, yang seharusnya dapat membantu penyelesaian masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh negara karena terbatas kedaulatan negara juga terhalang ruang gerakannya. Selain mengeluarkan daftar dan kebijakan Anti-Soros tersebut, Pemerintah

Hongaria juga melakukan pemecatan terhadap pemimpin lembaga independen dan pengadilan Mahkamah Konstitusi (Hungarian Helsinki Committee, 2014). Kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintahan Orban ini dinilai oleh publik sebagai kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, terutama kebijakan mengenai organisasi non-pemerintah di Hongaria.

Pemerintahan Perdana Menteri Viktor Orban menuduh beberapa organisasi-organisasi non-pemerintah memiliki hubungan dengan partai politik dan/atau membantu dalam pencapaian kepentingan asing (Hungarian Helsinki Committee, 2017). Pemerintah Hongaria (dalam Venice Commission, 2017) menyatakan bahwa bantuan yang diberikan sumber asing kepada suatu organisasi yang didirikan dengan dasar kebebasan berasosiasi, yang dapat mengarah ke penggunaan organisasi tersebut untuk mempromosikan kepentingan asing tertentu dibandingkan dengan tujuan komunitas dalam kehidupan politik dan sosial Hongaria. Selain itu, Pemerintah Hongaria juga mengkhawatirkan kemungkinan adanya pencucian uang hingga terorisme. Masyarakat banyak menolak gagasan ini karena dinilai tidak ada konsultasi dengan publik Hongaria sebelumnya. Adanya organisasi non-pemerintah di Hongaria dapat membantu masyarakat Hongaria untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh negara. Menurut Ulrich Beck (dalam Herz, 2014), terdapat “*debounded*” risks, seperti terorisme, krisis finansial, kejahatan transnasional, penyakit-penyakit menular, degradasi lingkungan, pelanggaran terhadap hak asasi manusia, krisis kemanusiaan, yang tidak terkandung oleh batas-batas nasional dan harus ditangani pada tingkat yang berbeda atau dalam lingkungan sosial yang berbeda.

Kebijakan Anti-Soros ini juga banyak dikatakan diberlakukan oleh Viktor Orban karena pandangan pribadi Orban pada kelompok tertentu. Belakangan ini Orban mulai dikenal sebagai sosok yang memiliki pandangan anti Bangsa Yahudi. Hal tersebut menjadikan Soros sebagai target utama serangan politik Orban. George Soros merupakan seorang keturunan Amerika-Hongaria ini juga seorang keturunan Yahudi, yang lahir pada masa penjajahan Jerman. Keluarga Soros menjadi salah satu keluarga yang selamat dari pembantaian Bangsa Yahudi setelah memalsukan

dokumen identitas dan menutupi latar belakang keluarganya (Georgesoros.com, 2019). Pada tahun 2017, Viktor Orban secara terang-terangan mempromosikan citra anti Kaum Yahudi karena adanya satu pemilik modal dari Kaum Yahudi yang merencanakan untuk mengendalikan dunia (Politico, 2019). Partai Fidesz milik Viktor Orban juga diketahui mendanai sebuah institut yang melakukan penelitian mengenai anti Kaum Yahudi. Viktor Orban juga telah mengumumkan akan menyumbangkan \$3,4 juta untuk memerangi anti Kaum Yahudi di Eropa (The New York Times, 2019).

Viktor Orban menggambarkan dirinya sebagai seorang populis dan pemimpin dari sebuah partai yang berafiliasi dengan pandangan politik sayap kanan (CBS News, 2019). Orban juga telah banyak mengkampanyekan agenda Kelompok Nasionalis dan mendukung kelompok anti-imigran. Banyak pejabat dari Uni Eropa dan Hongaria yang mengatakan bahwa Orban adalah seorang pemimpin nasionalis konservatif, yang sangat mendukung bentuk “demokrasi tidak liberal” (Taylor, 2015). Orban telah banyak melakukan penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan mayoritas dua pertiga suara parlemen untuk melakukan perubahan-perubahan konstitusi Hongaria, terlepas dari banyaknya suara yang memperingatkan Orban di Parlemen Eropa. Fakta bahwa Partai Fidesz, yang dipimpin oleh Orban, menduduki posisi terbanyak dalam Partai Rakyat Eropa, sebuah kelompok *center-right* terbesar di Parlemen Eropa membuat Orban terlindungi dari segala kecaman yang ada (Taylor, 2015).

1.2. Rumusan Masalah

Mengapa Pemerintahan Hongaria, pada periode kedua pemerintahan Viktor Orban (2010-sekarang) membatasi ruang gerak politik organisasi-organisasi non-pemerintah nasional yang didanai oleh yayasan milik George Soros?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencari penjelasan mengenai perubahan sikap Hongaria terhadap organisasi-organisasi non-pemerintah penerima dana asing.

Hongaria yang sejak tahun 1989 sudah mulai mengadopsi nilai-nilai demokrasi dalam aturan-aturan kenegaraannya, mulai mengubah sikap terhadap organisasi non-pemerintah, terutama yang menerima dan memberikan dukungan kepada George Soros. Hal ini menjadi menarik karena terdapat sentimen tersendiri dari Viktor Orban terhadap George Soros dibalik dibuatnya kebijakan tentang organisasi non-pemerintah ini. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya membahas transisi dan kepentingan Viktor Orban dalam membuat kebijakan tersebut di periode kedua pemerintahannya.

1.4. Kerangka Pemikiran

1.4.1. Level Analisis Individu (Idiosinkratik)

Analisis kebijakan luar negeri suatu negara juga dapat dilakukan dengan menganalisis orang yang memiliki *power* paling besar di negara tersebut. Level analisis individu atau idiosinkratik ini menurut Neack (2008), merupakan level analisis yang mementingkan individu pengambil kebijakan. Individu yang paling sering diteliti dalam level analisis ini adalah pemimpin negara atau pembuat kebijakan suatu negara. Neack (2008) mengasumsikan pemimpin negara sebagai representasi suatu negara. Setiap tindakan yang diambil oleh pemimpin negara merupakan bentuk tindakan yang diambil oleh negara secara keseluruhan karena pemimpin negara dianggap mewakili kepentingan nasional. Pemimpin negara juga diasumsikan sebagai tokoh yang rasional dalam mengambil kebijakan seperti sebuah negara (Rosati, 1995). Namun asumsi tersebut memunculkan banyak perdebatan. Salah satu perdebatan yang ada menganggap bahwa sikap rasional seorang pemimpin negara akan tetap dipengaruhi oleh keyakinan yang dimiliki oleh pribadi pemimpin negara dalam pengambilan kebijakan di situasi tertentu (Neack, 2008). Hal tersebut dikarenakan seorang pemimpin negara juga lebih cenderung untuk memperhatikan lingkungan psikologisnya sendiri. Seorang individu tidak akan tetap bersikap objektif dalam situasi-situasi tertentu. Emosi juga memiliki pengaruh terhadap pengambilan kebijakan seorang pengambil kebijakan (Breuning, 2007).

Kelompok realis juga memiliki pandangannya sendiri terhadap asumsi-asumsi yang

dapat digunakan dalam melakukan analisis level individu. Menurut kelompok realis, sebuah negara adalah aktor tunggal, yang memiliki seorang pemimpin untuk mengambil sebuah kebijakan, yang mana kebijakan tersebut kemudian menjadi sebuah kebijakan negara. Dari kemampuan untuk mengambil kebijakan tersebut, pemimpin negara juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tindakan reaksi dari aktor lain. Dengan melakukan analisis individu kita dapat mengetahui bagaimana reaksi dan kebijakan yang akan muncul dari suatu fenomena, yang kemudian ini akan mempengaruhi tindakan apa yang akan diambil oleh aktor lain atas kebijakan yang muncul (Breuning, 2007). Dalam melakukan analisis level individu ini, hal yang menjadi penting untuk diperhatikan adalah pandangan individu pembuat kebijakan terhadap fenomena tertentu. Dengan mengetahui pandangan yang dimiliki individu pembuat kebijakan, kita dapat mengetahui kebijakan seperti apa yang akan ditetapkan oleh individu tersebut (Breuning, 2007). Analisis tersebut dapat disebut dengan *leadership traits analysis*. Oleh karena itu, setiap tindakan hingga pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin negara atau pengambil kebijakan menjadi kunci penting dalam melakukan analisis level individu.

Level analisis ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari level analisis ini adalah peneliti dapat menganalisis secara lebih mendalam lagi dalam pembuatan kebijakan suatu negara. Analisis ini mampu menggambarkan pengambilan keputusan dari pandangan yang lain, yang tidak dapat dijelaskan secara rasional atau normatif (Neack, 2008). Selain itu menganalisis pandangan pembuat kebijakan dapat memperkaya pengetahuan peneliti dalam meneliti kebijakan yang diambil oleh suatu negara. Individu pembuat kebijakan memiliki pandangannya sendiri terhadap suatu fenomena, yang mana hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi psikologis dan emosi dari pembuat kebijakan itu sendiri. Namun, selain kelebihan, analisis level ini tentu juga memiliki kekurangan. Penggunaan latar belakang, pengalaman yang terjadi di masa lalu atau masa kini milik pembuat kebijakan atau pemimpin negara tidak selalu dapat menghasilkan jawaban untuk menjelaskan keputusan yang diambil untuk menyelesaikan suatu fenomena (Breuning, 2007).

Hal tersebut dikarenakan pengalaman dalam hidup seseorang dapat mempengaruhi sifat seorang individu seiring berjalannya waktu. Kelemahan lainnya dari analisis level individu adalah kurang atau sedikitnya informasi yang dapat didapatkan oleh peneliti terkait dengan individu yang sedang diteliti. Informasi pribadi seorang pemimpin negara tidak selalu diceritakan untuk publik (Breuning, 2007). Kelemahan terakhir adalah setiap pernyataan yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan tidak selalu berasal dari pandangan pembuat kebijakan tersebut.

1.4.2. Hubungan dan Pengaruh NGO pada Negara

Penulis melihat bahwa teori mengenai hubungan organisasi non-pemerintah dengan negara dapat digunakan dalam penelitian ini. Hubungan antara negara dengan organisasi-organisasi non-pemerintah ini telah banyak berkembang, terutama setelah konferensi yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa di Stockholm pada tahun 1972. Pada saat itu terdapat lebih dari 250 organisasi non-pemerintah menghadiri Konferensi Stockholm, untuk merepresentasikan konstituante terikat dengan nilai-nilai, pengetahuan, dan/atau *interest* bersama (Betsill dan Corell, 2008). Semenjak Konferensi Stockholm diadakan, keterlibatan organisasi non-pemerintah dalam proses-proses pembuatan keputusan internasional, terutama yang terkait dengan lingkungan dan pengembangan berkelanjutan, meningkat drastis (Betsill dan Corell, 2008). Organisasi-organisasi non-pemerintah dapat membantu negara dalam menyediakan data-data penunjang melalui penelitian yang saintifik dan netral karena adanya kelompok epistemik dalam organisasi. Menurut Haas (1989), sebuah kelompok epistemik dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang memiliki kemampuan dalam bidang tertentu yang berhubungan dengan permasalahan yang perlu diselesaikan dengan bantuan organisasi non-pemerintah.

Organisasi-organisasi non-pemerintah ikut andil dalam perumusan kebijakan suatu negara bukanlah menjadi hal yang asing. Negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan aktor lain, terutama di era globalisasi. Kemampuan organisasi untuk bergerak lebih bebas dibandingkan negara dan juga kemampuan untuk menyajikan data untuk mendukung suatu penelitian, menjadi faktor pentingnya keterlibatan organisasi non-pemerintah. Menurut Edward D.

Mansfield dan Jon C. Pevehouse (2006) negara-negara yang mengalami transisi menjadi demokrasi pada umumnya akan secara alami memasukkan andil dari organisasi non-pemerintah dalam pembuatannya. Namun yang terjadi di Hongaria, negara justru mulai membatasi campur tangan dari organisasi- organisasi non-pemerintah, terutama untuk yang menerima pendanaan asing. Hal tersebut dapat dibilang asing, terlebih pada era globalisasi ini peranan aktor baru, seperti organisasi internasional mulai meningkat dalam hal pengambilan keputusan yang sebelumnya hanya menjadi hak prerogatif sebuah negara yang berdaulat (Cutler, 2002).

Organisasi internasional dapat diartikan sebagai penerapan dari bentuk kerja sama kolektif dengan struktur yang dibuat berdasar pada landasan hukum serta kebiasaan manusia baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, hingga politik (Duverger 1972 dalam Archer, 1992). Organisasi internasional dapat dijadikan wadah bagi negara untuk mencapai kepentingan bersama. Kemudian, yang menjadi kelebihan dari organisasi internasional ini adalah organisasi internasional mampu mencegah terjadinya kecurangan yang mungkin untuk dilakukan dan juga mencegah terjadinya ketidakadilan distribusi keuntungan dalam kerja sama yang dilakukan (Keohanne dan Martin, 1995). Organisasi internasional mampu menjadi media yang dapat menjembatani negara-negara dan memberikan solusi dalam penanganan *dilemma of strategic interaction* yang dihadapi oleh suatu negara (Martin, 1992). Selain itu organisasi internasional juga memiliki keahlian dalam bidang-bidang tertentu dan memiliki sifat yang netral dalam penyelesaian suatu masalah sehingga organisasi internasional ini menjadi sebuah organisasi yang independen.

Organisasi internasional ini yang kemudian dapat menyediakan informasi akurat dan mewadahi negara anggotanya untuk melakukan konsultasi dalam upaya penyelesaian masalah (Abott dan Snidal, 1998). Sifat netral dan independen ini menjadikan organisasi internasional dapat bergerak bebas. Namun pergerakan dari organisasi internasional juga dapat terhalang oleh kedaulatan yang dimiliki oleh negara. Kedaulatan menjadi sebuah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara (Salamah, 2017). Organisasi nasional maupun internasional di Hongaria

mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsinya di Hongaria karena terbatas oleh kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Orban kedua. Dalam periode kedua pemerintahan Orban, Viktor Orban banyak mengambil tindakan dan membuat kebijakan untuk membatasi ruang gerak organisasi-organisasi nasional, terutama yang menerima dana dari yayasan George Soros. Hal tersebut memunculkan pertanyaan, mengingat banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh organisasi-organisasi non-pemerintah.

1.4.3. Populisme

Penulis menggunakan kerangka berpikir populisme untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada. Penggunaan kerangka berpikir ini didasarkan pada bagaimana pengaruh populisme terhadap pembentukan kebijakan oleh seorang pemimpin negara. Populisme sendiri merupakan konsep yang telah ada sejak abad ke-19, yang mana pada masa tersebut banyak bermunculan gerakan berbasis pertanian di Amerika (Dix, 1985). Populisme pada masa itu mencakup kelompok-kelompok atau gerakan politik yang memiliki basis masa dan terdiri dari berbagai kelas. Kelompok ini menyuarakan pendapat anti terhadap “*money power*”, yang marak terjadi pada *Gilded Age*, yang mana pada masa itu korupsi, monopoli dan stadarisasi emas marak terjadi di Amerika Serikat (Wills, 2016). Populisme menjadi populer di Amerika Serikat dan Eropa karena adanya kepentingan dalam momentum kemenangan politik kelompok yang menginginkan pengembalian kekuasaan pada masyarakat dari kelompok elitis yang korup (Riedel, 2017).

Mudde (2004, dalam Stockemer, 2019) mengatakan bahwa populisme adalah sebuah ideologi yang menganggap masyarakat pada akhirnya akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok homogen dan antagonis, yang menyebut dirinya sebagai “orang-orang murni” dan para koruptor, yang berpandangan bahwa politik harus menjadi sarana masyarakat untuk berekspresi dan berkehendak. Kelompok populis umumnya akan menggunakan semangat nasionalisme dan otoritarianisme dalam mencapai tujuannya. Selain anti terhadap kelompok elitis, kelompok populis dikenal sebagai kelompok yang anti terhadap pluralisme (Müller, 2016). Kelompok akan merasa kelompoknya sudah dapat merepresentasikan rakyat di negaranya.

Kelompok yang menjadi oposisi kelompok populis di politik, akan menjadi lawan dan dianggap tidak sepenuhnya orang dengan nasionalitas yang sama. Secara sederhananya, kelompok oposisi tidak akan mengatakan “kami adalah 99 persen” tetapi akan mengatakan “kami adalah seratus persen” (Müller, 2016).

Kelompok dengan pandangan populis tidak akan mudah menerima bangsa atau kelompok lain yang tidak memiliki latar belakang yang sama dengan kelompok tersebut. Selain latar belakang, kesamaan pandangan tentang bagaimana kehidupan bernegara seharusnya diterapkan juga menjadi penting. Perbedaan pandangan akan hal tersebut akan menjadikan kelompok yang bertentangan menjadi kubu oposisi yang harus disingkirkan. Negara-negara di Eropa juga mengalami kebangkitan kelompok populisme, terutama di negara-negara Eropa Timur. Pada tahun 2018, delapan negara di Uni Eropa, seperti Austria, Belgia, Denmark, Finlandia, Italia, Polandia, Slovakia dan Hongaria, dipimpin oleh partai radikal sayap kanan, nasionalis, dan xenophobia (Traverso, 2019). Kebangkitan populis sayap kanan di Hongaria sendiri dapat dijelaskan dengan adanya kepenatan dan amarah pasca transformasi, yang kemudian ditransformasikan menjadi narasi perlawanan terhadap "*catching-up with the west*" (Korolczuk, 2019). Narasi tersebut menggambarkan bagaimana kelompok populis di negara-negara Eropa Timur ingin menunjukkan bahwa negara-negara tersebut juga dapat bersaing dan tidak memerlukan demokrasi seperti yang ada di barat untuk menjadi negara maju.

1.5. Argumentasi Penelitian

Dari pembahasan di atas, penulis dapat mengambil dua argumentasi awal, yang akan diteliti lebih lanjut, yaitu:

1. Kepentingan Viktor Orban yang menginginkan tidak adanya campur tangan atau pengaruh dari aktor lain di Hongaria. Hal ini dipengaruhi oleh pandangan Orban, yaitu konservatif-sayap kanan dan populisme,
2. Pandangan Viktor Orban dalam melihat pengaruh negatif aktor asing, melalui organisasi non-pemerintah nasional, terhadap stabilitas kedaulatan pemerintah yang sedang berkuasa di Hongaria.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Konservatif-Sayap Kanan

Konsep dari konservatif-sayap kanan yang diambil oleh penulis berdasar pada beberapa pengertian konservatif-sayap kanan yang disampaikan oleh para ahli. Salah satu ahli yang menjadi acuan penulis adalah Timothy G. Baysinger, dengan tulisannya “*Right-Wing Group Characteristics and Ideology*”. Dalam tulisannya, kelompok konservatif-sayap kanan dijelaskan sebagai kelompok yang berbasis pada ajaran agama Kristen. Terdapat satu karakteristik inti yang dapat digunakan untuk memahami kelompok ini, yaitu Identitas Kristiani (Baysinger, 2006). Kelompok konservatif-sayap kanan dikenal sebagai kelompok yang menggunakan agama Kristen sebagai dasar ideologinya. Namun tidak semua kelompok sayap kanan menganut ide gerakan Identitas Kristiani. Identitas Kristiani ini lebih menjadi ciri yang menonjol untuk kelompok konservatif-sayap kanan ekstrem (Baysinger, 2006).

Identitas Kristiani ini mulai berkembang sejak pertengahan abad ke-19, setelah muncul gerakan yang berdasarkan pada paham British-Israelis, yang dicetuskan oleh John Wilson. Buku, pidato hingga tulisan-tulisan lainnya dari John Wilson menarik minat dan rasa tahu kelompok kelas menengah Inggris (Baysinger, 2006). Perkembangan Identitas Kristiani tidak hanya berhenti di Inggris. Paham British-Israelis juga mulai dikenal di Kanada, Washington dan Oregon, yang mana di ketiga wilayah ini paham tersebut mendorong pengadopsian kepercayaan apokaliptik, konspirasional dan anti-Semit. Menurut kepercayaan kelompok konservatif-sayap kanan berdasarkan paham British-Israelis, dibenarkan untuk melakukan hukuman mati, perbudakan, atau pengusiran kepada orang-orang yang tidak beragama Kristen, bukan kulit putih dan Yahudi (Baysinger, 2006). Menurut David Art (2013), kelompok sayap kanan, kelompok ekstrem kanan, kelompok populis sayap kanan atau kelompok kanan radikal merupakan kelompok oposisi dari imigrasi dan integrasi di Eropa.

Tindakan-tindakan yang kerap dilakukan oleh kelompok sayap kanan menunjukkan sikap xenophobia. Kelompok tersebut juga selalu mengatasnamakan negara atas

setiap tindakan atau kebijakan yang diambil saat menduduki pemerintahan. Kelompok ekstrimis sayap kanan di Eropa sudah menjadi perhatian besar, terutama di era kontemporer ini. Dalam tulisan Paul Krugman (dalam Art, 2013), telah memberi peringatan akan adanya kebangkitan dari kelompok sayap kanan, yang mana kebangkitan ini kemungkinan akan mampu memaksa Eropa untuk menghilangkan demokrasi dan memicu konflik antarnegara. Pergerakan kelompok sayap kanan di Eropa memang dapat dikatakan sangat ekstrem. Telah banyak tragedi yang menunjukkan bagaimana gambaran dari kelompok sayap kanan dan ideologi yang dianutnya.

1.6.2. Kedaulatan

Kedaulatan menjadi salah satu fokus yang dipelajari dalam Ilmu Hubungan Internasional. Disiplin ini mempelajari tentang hubungan antar negara yang berdaulat sehingga kedaulatan juga menjadi salah satu perhatiannya. Kedaulatan sendiri dapat digambarkan sebagai sebuah institusi, yang memiliki seperangkat aturan untuk dijalankan oleh negara (Jackson dan Sorensen, 2009). Aturan dalam pengertian tersebut merupakan kewenangan suatu negara untuk menyatakan dan mengatur kemerdekaan negara lain dan sebagai penanda kekuasaan nasional. Awal dari kepemilikan negara terhadap kedaulatannya adalah dari negara lain. Negara dapat memperoleh kemerdekaan politiknya dari negara lain. Setelah memperoleh kemerdekaan politik dari negara lain, pemerintah yang berkuasa dapat memiliki kuasa tertinggi untuk membuat dan melaksanakan hukum di negaranya (Jackson dan Sorensen, 2009). Inti dari pengertian kedaulatan adalah otoritas penuh pemerintah untuk menjalin hubungan dengan aktor lain dalam sistem internasional dan mengatur segala urusan domestik negara.

Kedaulatan sendiri memiliki tiga dimensi, yaitu eksternal, internal, dan teritorial (Ashari, 2015). Dimensi eksternal dari kedaulatan dapat diartikan sebagai hak milik negara untuk memilih dan menjalin hubungan internasional dengan aktor lain secara bebas. Dari dimensi tersebut dapat digambarkan bahwa kedaulatan merupakan sebuah kemerdekaan suatu negara (Ashari, 2015). Sedangkan untuk dimensi internal, pemerintah negara memiliki hak dan kemampuan untuk

menentukan bentuk pemerintahan dan membuat serta menjalankan aturan. Dimensi teritorial sendiri adalah otoritas negara akan wilayah dan semua yang ada di dalamnya. Kedaulatan ini terkadang menjadikan negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasionalnya karena menjadi dasar dari prinsip non intervensi (Ashari, 2015). Namun menurut penulis, negara dapat menyalahgunakan kedaulatannya untuk menutup diri dari hubungan internasional. Kedaulatan di era globalisasi sudah memiliki bentuk penerapan baru. Era globalisasi adalah era di mana negara seharusnya lebih terbuka, terutama dalam konteks kerja sama untuk penyelesaian masalah internasional.

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer. Data-data yang digunakan oleh penulis didapatkan dari pihak pertama, yang berupa pernyataan resmi, pidato, dokumen pemerintah dan hasil rapat kenegaraan. Selain itu, penulis juga menggunakan sumber data, yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, buku, dokumen organisasi non pemerintah, maupun laporan penelitian, yang diterbitkan dalam bentuk cetak maupun daring.

1.7.2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan oleh penulis dalam menjawab penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, di mana penulis berusaha memahami fenomena yang diangkat. Penulis berusaha memahami fenomena tersebut dengan mencoba mencari hubungan antara variabel yang termasuk dalam penelitian sehingga dapat menghasilkan jawaban atas penelitian yang diadakan.

1.8. Jangka Waktu Penelitian

Fokus penelitian ini meneliti model pemerintahan Viktor Orban mulai dari periode pertama pada tahun 1998 dan periode kedua (2010) hingga saat ini (2019). Namun penulis juga menghubungkan model pemerintahan Orban dengan bentuk demokrasi Hongaria. Oleh karena itu, penulis juga menuliskan perkembangan demokrasi

Hongaria, yang dimulai pada tahun 1989.

1.9. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas lima bab, yang mana pada Bab I terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka penelitian, argumentasi penelitian, metodologi penelitian, jangka waktu penelitian, dan sistematika penulisan. Selanjutnya pada Bab II, penulis membahas mengenai bentuk demokrasi Hongaria, dari awal berubahnya ideologi di Hongaria pada tahun 1989 hingga bentuk demokrasi Hongaria pada periode kedua pemerintahan Viktor Orban (tahun 2010). Termasuk pendekatan terhadap organisasi non-pemerintah yang mendapat bantuan dana asing. Serta bagaimana lini masa pembuatan kebijakan tentang organisasi non-pemerintah di Hongaria.

Bab III dalam penelitian ini memuat tentang pengaruh pandangan politis Viktor Orban yang membatasi peranan aktor di luar dirinya dalam pembuatan kebijakan di Hongaria, terutama yang membahas tentang pembatasan ruang gerak politis organisasi non-pemerintah nasional untuk membahas argumentasi penelitian pertama. Sedangkan pada Bab IV, penulis meneliti tentang pengaruh negatif aktor asing (baik dari sisi penyedia dana maupun organisasi non-pemerintah nasional penerima dana asing) terhadap stabilitas kedaulatan pemerintah yang sedang berkuasa di Hongaria. Terakhir, Bab V skripsi ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.